

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

Neo Agustina dan Ahmad Saifanur

Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

Abstract

This study aims to examine the effect of accounting system implementation, regional financial management and internal supervision to government financial performance at SKPD of North Aceh Regency. This study uses primary data obtained by distributing questionnaires to 60 employees who serve as research samples. The data were analyzed using a multiple linear regression. The results of the study show that partially; the implementation of the accounting system and internal supervision has a significant effect to the government's financial performance at SKPD of North Aceh Regency. Regional financial management has effect not significant to government financial performance at SKPD of North Aceh Regency. The simulant, accounting system implementation, regional financial management and internal supervision has a significant effect to the government's financial performance at SKPD of North Aceh Regency, which is influenced about 59.8% and 40.2% influenced by other variables outside of this research.

Keywords: *Accounting System Implementation, Regional Financial Management Internal Supervision, Government Financial Performance*

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014: pasal 1 ayat 6).

Penerapan sistem akuntansi terhadap keuangan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan setiap pemerintah daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

disebutkan bahwa: "Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Selain mengatur SAP Berbasis Akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

Sistem akuntansi merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa "Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD".

Di samping sistem akuntansi, faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja

suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2015:2-3).

Hasil penelitian Putra (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Hidayat (2015) juga menunjukkan hasil bahwa Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain faktor implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal juga dapat mempengaruhi kinerja

pemerintah. Pengawasan internal di lingkungan sektor publik mempunyai sifat yang khusus. Organisasi pemerintah dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor privat. Pengawasan internal merupakan pelaksanaan (tindakan langsung) dari perencanaan juga pelaksanaan yang memberikan umpan balik. Pengawasan internal yang efektif dapat membantu suatu organisasi atau kantor pemerintahan menyediakan keyakinan yang memadai mengenai informasi pelaporan keuangan organisasi.

Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Menurut Sabeni dan gozali dalam Primadona (2013) pengawasan internal merupakan suatu alat pengawasan dari pemimpin organisasi yang berangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana-rencana dan kebijakan yang telah ditentukan.

Hasil penelitian Yusmalizar (2014) menunjukkan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian Hikmatul (2016) juga menunjukkan hasil bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di Kota Bandung dan memiliki arah hubungan yang positif/searah, artinya jika pengawasan intern dilakukan dengan baik maka akan membuat kinerja pemerintah daerah semakin baik pula.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kabupaten Aceh Utara untuk Tahun Anggaran 2014 adalah "Wajar Dengan Pengecualian" atau "*Qualified Opinion*". Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara."

B. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan Dwijowijoto, (2003:70). Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004: 64) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004:64), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009: 295).

2. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah Bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. Akuntansi, dalam hal ini, harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen (Munawir, 2004:8)

Menurut Wild dan Kwok dalam Agoes dan Trisnawati (2013:1) Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan

keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.

Munawir (2004:5) menyatakan akuntansi adalah seni dari pada pencatatan, penggolongan dan peringkasan pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan petunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari padanya.

Sedangkan menurut Suwardjono (2008:10) akuntansi yaitu: 1) Sebagai seperangkat pengetahuan, akuntansi dapat didefinisi sebagai: seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi; 2) Dalam arti sempit akuntansi sebagai proses, fungsi, atau praktik, akuntansi didefinisi sebagai: proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

3. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi

Fungsi utama dalam sistem akuntansi ialah mendorong seoptimal mungkin agar sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi

akuntansi yang terstruktur yakni tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya. Unsur yang terdapat suatu sistem akuntansi saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga dapat dilakukan pengolahan data mulai dari awal transaksi hingga dengan pelaporan yang bisa dijadikan sebagai informasi akuntansi.

Menurut Mulyadi (2008:3) mengungkapkan unsur-unsur sistem akuntansi sebagai berikut:

1. Formulir
2. Jurnal
3. Buku Besar
4. Buku Pembantu
5. Laporan

Menurut Fakhri (2003:4) elemen-elemen penting dalam suatu sistem akuntansi adalah:

1. Pemakai akhir, terdiri dari pemakai akhir eksternal yaitu kreditor, infestor, pemegang saham, pemerintah, dan pemakai akhir internal yaitu pihak manajemen.
2. Sumber data, transaksi keuangan yang memasuki sistem informasi dari sumber eksternal dan internal.
3. Pengumpulan data, tahap operasional yang tujuannya untuk memastikan bahwa data yang memasuki sistem itu sah, lengkap, dan bebas dari kesalahan.
4. Pemrosesan data, data yang memasuki sistem di proses sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna.
5. Manajemen database, yaitu menyimpan, memperbaiki, dan memanggil serta menghapus data.
6. Penghasil informasi, yaitu mengumpulkan, mengatur,

memformat, dan menyajikan informasi untuk para pemakai.

7. Umpan balik, yakni bentuk output yang dikirim kembali ke sistem sebagai sumber data.

Dari kutipan di atas jelas diketahui bahwa di dalam sistem akuntansi perlu mendapat perhatian utama dalam mengumpulkan data, agar sesuai dengan informasi yang diperlukan perlu menggunakan buku-buku yang dituliskan dengan tangan, mesin ataupun dengan alat elektronik lainnya.

4. Tujuan dan Fungsi Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian. Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Hall (2008:44) adalah sebagai berikut:

1. Mendukung operasional harian
2. Mendukung fungsi kepengurusan manajemen
3. Mendukung proses pengambilan keputusan manajemen

Menurut Mulyadi (2008:3) menyatakan indikator-indikator sistem akuntansi adalah:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal tersebut.

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi. Termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan.

5. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Halim (2007:330) pengelolaan keuangan Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan

kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (Halim, 2007:24).

Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang telah ditetapkan (PP 58/2005, Pasal 39). Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan public dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah (Halim, 2007:24).

6. Prinsip dan Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah:

1. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah yang

transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.

4. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan Negara dari daerah.
5. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

7. Pengertian Pengawasan Internal

Menurut (Nawawi:2002) pengawasan intern adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak dan atau pimpinan atau manajer unit atau satuan kerja dilingkungan organisasi dan atau unit atau satuan kerja masing-masing. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2011 Pasal 1, pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Gondodiyoto (2009:160), unsur-unsur sistem pengawasan internal sangat penting karena sistem mempunyai beberapa unsur dan sifat-sifat tertentu yang dapat meningkatkan

kemungkinan dapat dipercayainya data-data akuntansi serta tindakan pengamanan terhadap aktiva dan catatan perusahaan. Setiap unsur mempunyai kaitan langsung dengan tujuan pengendalian intern serta langkah-langkah yang dapat ditempuh perusahaan untuk memenuhinya. Unsur paling penting dari sistem pengawasan internal terletak pada para pelaksanaannya, yaitu karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya

Menurut Handoko yang dikutip oleh Handayani (2011:375) indikator-indikator pengawasan internal yaitu:

1. Pengamatan
Pengamatan adalah aktifitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau object dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
2. Inpeksi teratur dan langsung
Inpeksi teratur dan langsung merupakan salah satu alat control manajemen yang bersifat klasik tetapi masih sangat relevan dan secara luas sudah banyak diterapkan dalam upaya menemukan masalah yang dihadapi dilapangan termasuk untuk memperkirakan besarnya resiko
3. Pelaporan lisan dan tertulis
Suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan

ataupun pertanggung jawaban baik secara lisan maupun tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggungjawab yang ada.

4. Evaluasi pelaksanaan

Suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan dan menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan

5. Diskusi antara atasan dan bawahan

Pertukaran pendapat dan gagasan dalam bentuk lisan untuk mencari sebuah solusi dari sebuah masalah dan mendapat kesepahaman antara atasan dan bawahan.

8. Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan menurut Muchlich (2000:44) adalah prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan yaitu neraca rugi-laba dan kinerja keuangan menggambarkan usaha perusahaan (*operation income*). Profitability suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

Menurut Irham Fahmi dalam Mutmainah (2013) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal

dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Wulan Ariani dalam Yuliah Mutmainah (2013) indikator untuk mengukur kinerja keuangan adalah sebagai berikut: (a) Kemandirian keuangan daerah; (b) Efektifitas; (c) Efisiensi; (d) Aktifitas; dan (e) Keserasian.

Menurut Abdul Halim (2007:31) prinsip-prinsip *Public Expenditure Management* disebutkan bahwa penganggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output*) dengan (*input*) pengeluaran anggaran setidaknya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah.

Adapun prinsip-prinsip *Public Expenditure Management* menurut Abdul Halim (2007:31) adalah:

1. Akuntabilitas
2. Kejujuran
3. Transparansi
4. Pengendalian

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian di atas, maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan instrument angket. Yang dibagikan kepada 90 pegawai SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang

menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Bentuk formula regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1ISA + b_2 PKD + b_3 PI + e$$

Dimana:

- Y : Kinerja keuangan pemerintah
- a : Konstanta
- ISA : Implementasi sistem akuntansi
- PKD : Pengelolaan keuangan daerah
- PI : Pengawasan internal
- b 1-3 : Koefisien regresi
- e : *Error Term*

D. Pembahasan

1. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi sistem akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Berpengaruhnya implementasi sistem akuntansi terhadap kinerja keuangan pemerintah karena sistem akuntansi yang diimplementasikan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai macam pengguna karena adanya data-data yang diperlukan, Sistem akuntansi memudahkan para pengguna untuk

menyimpan data-data laporan keuangan, dengan menggunakan sistem akuntansi, data-data laporan keuangan dapat diproses dengan mudah, cepat dan akurat, dan penerapan sistem akuntansi berguna untuk mengendalikan data-data laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara tersebut. Hasil penelitian tersebut telah dibuktikan dari tanggapan responden bahwa implementasi sistem akuntansi pada SKPD Kabupaten Aceh Utara termasuk kedalam kategori sangat baik.

Sistem akuntansi merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa "Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengelolaan keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh

Utara. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Disamping itu, pelaksanaan anggaran dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah masing-masing selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Selama tahun 2017 pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara sudah mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah yang baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan daerah. Sehingga dengan pengelolaan keuangan yang baik, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali menerima penghargaan dari Badan Pemeriksaan keuangan perwakilan Provinsi Aceh (BP) berikan Opinin "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas LKPD Tahun Anggaran 2017.

3. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Berpengaruhnya pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara karena dalam melaksanakan

pengendalian, terdapat kebijakan tertulis mengenai kedisiplinan dan kejujuran yang telah ditetapkan, dalam pelaporan keuangan dilakukan pengawasan secara rutin dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban, dalam melakukan pengawasan penggunaan keuangan, pihak pemerintah Kabupaten Aceh Utara melibatkan berbagai macam unsur sehingga pelaporan keuangan lebih konkrit dan jelas, pengendalian dibidang informasi dan komunikasi terhadap penggunaan keuangan dilakukan secara rutin tiap-tiap bulan, dan aktifitas pengendalian dilakukan secara bersama-sama seluruh pegawai dengan pihak pengelolaan keuangan terhadap laporan yang dibuat. Hasil penelitian tersebut telah dibuktikan dari tanggapan responden bahwa pengawasan internal pada SKPD Kabupaten Aceh Utara termasuk kedalam kategori sangat baik.

Secara simultan atau secara bersama-sama implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal mempunyai hubungan yang kuat dengan kinerja keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah pada SKPD

Kabupaten Aceh Utara sebesar 59,8%. Sisanya 40,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemahaman akuntansi, pengalaman kerja, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan lain-lain.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.
2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.
3. Pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.
4. Secara bersama-sama implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar 59,8% dan 40,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

F. Daftar Pustaka

Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estranita. (2013). **Akuntansi Pajak.** Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Bastian, Indra. (2001). **Pengelolaan Keuangan Daerah.** Jakarta: Erlangga

Dwijowijoto. (2003). **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.** Jakarta: Elex Media Komputindo.

Fakhri, Muhammad Husen. (2003). **Sistem Informasi Akuntansi,** Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Gaffar, Afan. (2009). **Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi,** Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghozali, Imam, (2005), **Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS,** Semarang: Universitas Diponegoro.

Gondodiyoto, Santoyo. (2009). **Pengelolaan Fungsi Audit Sistem Informasi.** Jakarta: Nitra Wacana Media.

Hall, James A. (2008). **Sistem Informasi Akuntansi,** Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.

Handayanigrat, (2006). **Sistem Pengawasan,** Bandung: Remaja Ros dakarya.

Hasan, Iqbal. (2002). **Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya,** Bogor selatan Ghalia Indonesia.

Hidayat, Rahmad. (2015). **Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang**

- Pariaman).** Jurnal: Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hikmatul, M. Saras. (2016). **Pengaruh Pengawasan Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung).** Jurnal: Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
- Irawan, Prasetia. (2002). **Manajemen Sumber Daya Manusia.** Jakarta: Stia Lan Press.
- Mahsun, Muhammad. (2006). **Pengukuran Kinerja Sektor Publik.** Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2009). **Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi.** Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). **Akuntansi Sektor Publik.** Yogyakarta: Andi.
- Modus Aceh. Paripurna **DPRK Aceh Utara; Satu Sidang Segudang Temuan. 28 Mei 2015.**
- Muslich. (2000). **Manajemen Keuangan Modern: Analisis, Perencanaan, dan Kebijaksanaan.** Jakarta: Bumi Aksara Bekerjasama dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mulyadi. (2008). **Sistem Akuntansi,** Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, Slamet. (2004). **Analisa Laporan Keuangan,** Yogyakarta: Liberty.
- Murdjianto. (2001). **Manajemen Sumber Daya Manusia.** Bandung: Bina Atmaja.
- Mutmainah, Yuliah, (2013). **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Kesehatan P Gorontalo.** Jurnal: Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.
- Nazir, Moh. (2009). **Metode Penelitian.** Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. (2010). **Metode Penelitian Bidang Sosial.** Yogyakarta: Gajah Mada, University press.
- Nawawi, Hadari. (2002). **Pengawasan Intern.** Bandung: Alfabeta.
- Primadona, Almanda. (2013). **Pengaruh Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Penelitian pada Pemerintah Kota Bandung).** Jurnal: Akuntansi. Universitas Komputer Indonesia.
- Putra, Nopriansyah. (2016). **Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating pada Provinsi Sumatera**

- Utara.** Jurnal Ekonom, Vol 19, No 4, Oktober 2016.
- Republik Indonesia, Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang **Kuangan Negara.**
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang **Pengelolaan Uang Negara/Daerah.**
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintah.**
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.**
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.**
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2007 Tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008 Tentang **Standar Audit Aparat Pengendalian Internal Pemerintah.**
- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 Tentang **Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh.**
- Republik Indonesia, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Santoso, Singgih. (2002), **Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik.** Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suwardjono. (2008). **Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan.** Edisi ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Sugiyono, (2007), **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,** Cet. XIV, Bandung, Alfabeta.
- Tribun News,
<http://aceh.tribunnews.com/2017/08/07/pemkab-aceh-utara-raih-wtp-kedua>, diunduh tanggal 10 April 2018.
- Umar, Husaini, dkk. (2006). **Pengantar Statika.** Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). **Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.** Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusmalizar. (2014). **Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi**

Neo Agustina dan Ahmad Saifanur

Sumatera Barat). Jurnal:
Akuntansi. Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang.

•